

ABSTRAK

Perlakuan Akuntansi Piutang Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Nganjuk

**Resma Dwi Wijayanti
NPM 193209018**

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Nganjuk yang beralamat di Jalan Basuki Rachmad Nomor 1 Nganjuk. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlakuan piutang dan penerapan laporan keuangan pada BPKAD berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara, untuk mengumpulkan informasi dapat berupa laporan keuangan pemerintah yang telah di audit oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK) untuk dianalisis sesuai Standar Akuntansi Piutang Nomor 6 tentang Akuntansi Piutang disertai dengan bukti pendukung yaitu dokumentasi. Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 telah membawa perubahan yang signifikan dalam pelaporan keuangan pemerintah. Perubahan tersebut dituangkan dalam kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi yang menjadi dasar sebelum diterapkan dalam penyajian laporan keuangan. Perubahan basis akuntansi menjadi basis akrual harus dilakukan paling lambat pada tahun 2016. Hasil dari penelitian di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk telah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Tahun 2015 untuk penyusun laporan keuangan yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Laporan Arus Kas (LAK). Jumlah aset lancar pada tahun 2020 mengalami peningkatan yang cukup besar Rp. 4.032.915.127,53 yang didapat dari total aset lancar tahun 2020 sebesar Rp. 445.230.242.894,16 dikurangi dengan total aset lancar tahun 2019 sebesar Rp. 441.197.327.766,63.

Kata Kunci: *Akuntansi Piutang, Laporan Keuangan, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)*

ABSTRACT

***Receivable Accounting Treatment Based on Government Accounting Standards
on the Local Government Financial Report (LKPD) of Nganjuk Regency***

***Receivable Accounting Treatment Based on Government Accounting Standards
on the Local Government Financial Report (LKPD) of Nganjuk Regency***

**Resma Dwi Wijayanti
NPM 193209018**

This research was conducted at the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of Nganjuk Regency, having its address at Jalan Basuki Rachmad Number 1 Nganjuk. The purpose of this study was to determine the analysis of accounts receivable and the application of financial statements to BPKAD based on Government Accounting Standards (SAP). Data collection techniques are carried out by means of observation and interviews, to collect information in the form of government financial reports that have been audited by the Financial Supervisory Agency (BPK) to be analyzed according to Accounting Standards for Accounts Receivable Number 6 concerning Accounting for Receivables accompanied by supporting evidence, namely documentation. The issuance of Government Regulation No. 71 of 2010 has brought significant changes in government financial reporting. These changes are set forth in the accounting policies and accounting systems that form the basis before being implemented in the presentation of financial statements. Changes in the accounting basis to the accrual basis must be carried out no later than 2016. The results of research at the Regional Financial and Asset Management Agency of Nganjuk Regency have applied the Accrual-Based Government Accounting Standards in 2015 for the preparation of financial statements consisting of: Budget Realization Report (LRA), Report on Changes in Budget Balance (LP SAL), Balance Sheet, Operational Report (LO), Report on Changes in Equity (LPE), and Statement of Cash Flows (LAK). Total current assets in 2020 experienced a large increase of Rp. 4,032,915,127.53 obtained from the total current assets in 2020 of Rp. 445,230,242,894.16 minus the total current assets in 2019 of Rp. 441,197,327,766.63.

Keywords: *Accounts Receivable, Financial Statements, Government Accounting Standards (SAP)*